

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Buku

- Agustino, Leo, 2007. *Perihal Ilmu Politik; Sebuah Bahasan memahami Ilmu Politik*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Apter, David.E. 1996. *Pengantar Analisa Politik*. PT.Pustaka LP3ES. Jakarta
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia. Jakarta
- Djohan, Djohermansyah. 2003. *Kebijakan Otonomi Daerah*. Yarsif Watampone. Jakarta
- Djohani, Rianingsih 2008. *Panduan Penyelenggaraan Musyawara Perencanaan Pembangunan Desa*. Studio Driya Media. Bandung
- Hadiawan, Agus 2006. *Teori Pembangunan (Buku Ajar)*. Universitas Lampung. Lampung
- Hertanto 2006. *Teori-Teori Politik Klasik dan Kontemporer (Buku Ajar)*. Universitas Lampung. Lampung
- Ishak 2010. *Posisi Politik Masyarakat Dalam Era Otonomi Daerah* Penaku.. Jakarta
- Kweit, Mary Grisez dan Kweit, Robert W. 1986. *Konsep dan Metode Analisa Politik*. Bina Aksara. Jakarta
- Mac Andrew, Collin dan Mas'Oed 2000. *Perbandingan Sistem Politik*. Rajawali Press. Jakarta
- Mardismo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI. Yogyakarta
- Rahman,A.HI 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Graha Ilmu.. Yogyakarta
- Ramses, Andi M dan Bakry, La 2009. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. MIPI.. Jakarta
- Setyanto, Widya P. 2008. *Panduan Penyelenggaraan Musyawara Perencanaan Pembangunan Kecamatan*. Studio Driya Media. Bandung
- Soemantri, Bambang Trisantono 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Fokusmedia. Bandung
- Wasistiono, Sadu; Nudin, Ismail; dan Fahrurozi, Muhammad . 2009. *Perkembangan ORGANISASI KECAMATAN Dari Masa ke Masa*. Fokusmedia (Anggota IKAPI). Bandung
- Karim, Abdul Gafar. 2003. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia* Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Kelompok Dokumen Peraturan

- Republik Indonesia. 1974. *Undang-Undang RI, No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*. Jakarta.

- Republik Indonesia. 1979. *Undang-Undang RI, No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang RI, No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang RI, No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang RI, No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia, 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Kementrian Dalam Negeri*. Jakarta.
- Republik Indonesia, 2008. *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Kementrian Dalam Negeri*. Jakarta.
- Republik Indonesia, 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan*. Kementrian Dalam Negeri. Jakarta
- Tanggamus, Pemerintah Kabupaten 2007. *Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Pekon Menjadi Kelurahan*. Tanggamus
- Tanggamus, Bupati 2008. *Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kecamatan*. Tanggamus

Kelompok Jurnal Dan Penelitian :

- Andari , Rosita Novi; 2010. *Model Pengembangan Kelembagaan Kecamatan Yang Berbasis Pada Kompleksitas dan Prioritas Layanan Publik (Studi Kasus di Kecamatan Lubuk Basung dan Ampek Angkek Kabupaten Agam, Sumatera Barat)* PKPPA I Lembaga Administrasi Negara. Sumedang.
- Dharmawan, Arya Hadi; 2008. *Reposisi Kapasitas Ketata-Pemerintahan Kecamatan: Arah, Skenario dan Evolusi Kelembagaan*) Kerjasama PSP3-IPB dengan DRSP. Bogor.
- Goetz, Anne Marie and Gaventa, John; 2001. *Bringing Citizen Voice and Client Focus into Service Delivery*, Lembar Kerja IDS No. 138, Juli 2001.